

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Nilai-nilai budaya telah mengalami pergeseran makna yang menyebabkan kekuasaan di daerah semakin terbuka setidaknya untuk kalangan elit, yakni kecenderungan dominasi kelompok keturunan bangsawan atau dalam bahasa Bugis disebut *anakarung* (Robinson 2005; Pelras 2006; Bakti 2007; Meiyani 2008; Zuhro 2009). Sebagai wilayah yang memiliki historis yang terbangun dari periodisasi kerajaan yang memiliki kekuatan yang mumpuni yakni Kerajaan Goa, Kerajaan Luwu dan Kerajaan Bone, masyarakat di daerah ini masih banyak sangat feodal. Membagi stratifikasi sosial antara keturunan seorang bangsawan dan bukan bangsawan yang masih sangat kental. Sekaligus secara sosiologis, dimana ada kelompok elit kultur yang lebih berpengaruh untuk mendapat keuntungan yang lebih besar. Strata sosial ini akan berimbas dalam konteks politik, terutama saat tren berlangsungnya politik langsung. Elit kultur di Sulawesi Selatan lebih banyak meloncat menjadi elit politik bahkan tak segan-segan menguasai basis ekonomi. (A. M. Yusuf, 2017).

Warisan kerajaan masa lalu masih mempengaruhi perjalanan seorang bangsawan di arena politik dan sosial di Sulawesi Selatan hingga sekarang. Bangsawan bugis yang memiliki bergelar “Andi” secara historis mendapatkan posisi yang dihormati di mata masyarakat. Keluarga bangsawan pada

umumnya memiliki sebidang tanah yang cukup banyak dan memiliki pekerjaan sebagai seorang staf dan politis. tetapi tatanan tingkat sosial, bangsawan digolongkan sebagai elit bersama-sama dengan semua, pengusaha, profesional, agamawan, intelektual, dan lain-lain . Dalam hal ini kekinian, bangsawan tersebut masih tetap memainkan perannya sebagai patron dengan menjaga hubungan dengan para client. (Muhammad Basir,2016) . Seperti halnya bangsawan “*Andi*” dalam pemilu di Sulawesi Selatan pada umumnya dan terkhusus masyarakat Bugis-Makassar yang sering kali lebih memperhatikan kaum bangsawan dalam kontestasi Pemilu baik itu Pilkada, Pilgub, maupun legislatif, ini karena budaya yang sering tertanam dalam pola pikir masyarakat Bugis. Salah satu wilayah di Sulawesi Selatan yang juga memiliki karakter bangsawan yang kental adalah Kedatuan Luwu.

Kedatuan Luwu yang juga masuk dalam sejarah “*I Lagaligo*” (Karya Sastra Masyarakat Bugis-Makassar) , di dalam *I Lagaligo* Luwu merupakan awal mula kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan pada masa kerajaan (Andi Ima Kusuma,2015). Bangsawan *Andi* di Kedatuan Luwu sekarang ini mengalami penurunan popularitas di Wilayah Kedatuan Luwu, yang ditandai dengan kurangnya Bangsawan yang menduduki tempat strategis di beberapa daerah Kedatuan Luwu, yakni kota Palopo, kabupaten Luwu ,Luwu Timur, Luwu Utara terutama menjadi seorang kepala daerah atau Bupati. Kedatuan luwu adalah salah wilayah yang masih diakui sampai saat ini di Sulawesi Selatan dengan sebutan Kedatuan Luwu yang dimana masih menjaga nilai-nilai adat istiadat, budaya politik, dan tradisi secara turun temurun.

Bangsawan di Kedatuan Luwu tidak begitu populer lagi dikalangan masyarakat sejak Pilkada tahun 2013 di Kedatuan Luwu di tandai dengan lengsernya Bangsawan dalam Pilkada di Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Luwu Utara, maupun Kota Palopo yang sebelumnya tiga daerah ini di pimpin oleh Bangsawan “*Andi*” Kepala Daerah. Mengapa Bangsawan di kedatuan luwu pada saat ini tidak lagi banyak memegang kendali dalam kontestasi yang diselenggarakan lima tahun sekali ini, itulah yang menjadi pertanyaan untuk diketahui.

Karena para peneliti sebelumnya hanya menekankan pada prinsip bahwa pemerintahan masih di pegang dan dimenangkan oleh para elit yang bergelar Bangsawan terutama yang bergelar “*Andi*”. Sistem kekerabatan dan pelapisan social bangsawan memiliki pengaruh dalam politik dan Pilkada yang dimana sebagai cara untuk mewujudkan bentuk sebuah kekuasaan para bangsawan, serta karakter kepemimpinan bangsawan yang dipunyai dan pengaruh adat istiadat (Muhammad Basir, 2016). “*Andi*” sebagai salah satu gelar bangsawan yang masih kokoh di beberapa daerah di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pucuk pimpinan, tetapi berbeda dengan Kedatuan Luwu Bangsawan sebagai panutan dalam memimpin sudah sangat jauh dari ideologi yang berkembang di masyarakat..

Kepopuleran Bangsawan “*Andi*” di Kedatuan Luwu makin memiliki penurunan, sejak tahun 2013 di Kota Palopo berakhirnya kepemimpinan Drs. H Patedungi Andi Tenriadjeng. Tahun 2015 di Kabupaten Luwu Utara dalam sejarah Sulawesi Selatan pertama kalinya seorang perempuan memimpin

sebagai Kepala Daerah yakni ibu Indah Putri Indriani berpasangan dengan Muh.Thahar Rum , mengalahkan Arifin Junaidi berpasangan dengan Andi Abdullah Rahim sebagai petahana (Tawakkal & T.Purwingsih, 2015), sedangkan di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 di tandai dengan berakhirnya jabatan Andi Hatta Marakarma sebagai Bupati.

Selain itu di Kabupaten Luwu sendiri dari beberapa tahun sebelumnya dalam Pilkada selalu ada seorang bangsawan yang mengikuti kontestasi tersebut, tetapi pada tahun 2018 ditandai tidak adanya seorang bangsawan mengikuti Pilkada di kabupaten Luwu, sebelumnya dipimpin oleh Andi Muzakkar yang masuk dalam kategori kelompok kekerabatan elit bangsawan Keluarga Qahhar Muzakkar di Kedatuan Luwu ( Titin Purwaningsih, 2015). Sejak tahun 2018 tidak ada lagi keluarga Qakah Muzakkar yang menjabat di jabatan kepala daerah. Dari empat daerah tersebut di kedatuan luwu, Kota Palopo sebagai pusat Kedatuan Luwu menjadi salah satu fokus penelitian ini.

Menambah daya tarik untuk melihat mengapa saat ini bangsawan “*Andi*” di Kedatuan Luwu makin tidak memiliki power dalam pertarungan politik, apakah kaum bangsawan “*Andi*” tidak lagi menjadi contoh yang baik untuk masyarakat atau ada faktor yang lain, apakah Bangsawan dimata masyarakat di Kedatuan Luwu tidak lagi melihat Empat unsur yang dimiliki Bangsawan, Sehingga mengakibatkan tidak sesuai lagi dengan teori yang berkembang di masyarakat Sulawesi Selatan yang melihat beberapa hal dalam memilih pemimpin apalagi yang identik dengan kaum bangsawan, yang menjadikan masyarakat menentukan bangsawan menjadi pemimpin oleh sebab

itu melekat erat dengan anggapan ini antara lain, yakni To Manurung (dipercaya), To Warani (Pemberani), To Acca' (pintar/pandai), To Sugi' (Kaya), Konsep inilah yang kemudian ingin diketahui bahwa apakah masyarakat tidak lagi memihat dari konsep yang mereka anut mengenai seorang Bangsawan.

Berakhirnya politik kerabaran keluarga Qahar Muzakkar ditandai dengan berakhirnya Andi Muzakkar sebagai bupati luwu seakan menjadi petanda berakhirnya semua kepala daerah di Kedatuan Luwu yang bergelar bangsawan terutama Andi, selain itu salah satu wilayah di Kedatuan Luwu yakni Kota Palopo sebagai pusat Datu Luwu dimana tahun pada tahun 2013 berakhirnya kepemimpinan bangsawan Andi hingga 2018 tidak ada lagi bangsawan Andi baik itu hanya sebagai Calon wali kota maupun wakil walikota. Ketika kita melihat trek rekor dari bangsawan Andi itu sendiri di lingkup Kedatuan Luwu justru memiliki power yang begitu kuat.

Tabel 1.1. Kepemimpinan bangsawan Andi di Kedatuan Luwu sebagai Kepala Daerah

No	Nama	Kabupaten/Kota	Tahun/periode
1	Andi Mudzakkar	Luwu	2009-2014 dan 2014-2018
2	Drs. H Patedungi Andi Tenriadjeng	Palopo	2003-2008 dan 2008-2013
3	H. M. Luthfi A.Mutty	Luwu Utara	2000-2005 dan 2005-2010
4	H. Andi Hatta Marakarma MP	Luwu Timur	2005-2010 dan 2010 2015

*Keterangan: data diolah oleh penulis (2019)*

Tabel diatas memperlihatkan kepemimpinan bangsawan sebagai kepala daerah maupun walikota di Kedatuan Luwu dari tahun ketahun, berakhirnya Andi Mudzakkar sebagai bupati Luwu tidak ada lagi bangsawan Andi yang menjabat sebagai kepala daerah di Kedatuan khususnya di Kota Palopo sebagai pusat kediaman Datu Luwu atau Istana kerajaan Luwu dimana semenjak tahun 2013 tidak ada bangsawan yang menjabat sebagai wali kota maupun wakil bukan hanya itu mengikuti pemilihan calon walikota atau calonwakilwalikota juga tidak ada hingga pemilihan 2018 di Kota Palopo.

Ketika melihat trek rekor Bangsawan Andi di Kedatuan Luwu dalam Pilkada sangat mencolok tetapi justru sekarang mulai melemah atau menurun, seharusnya justru semakin mencolok dan memiliki power karena pada zaman sekarang ini sudah memasuki era revolusi industri yang sangat pesat melalui media sosial dan media elektronik lainnya modal bangsawan dan modal sosial yang dimiliki seharusnya menjadi salah satu power yang harus diperlihatkan tetapi justru mengalami penurunan sehingga paradigma masyarakat di kedatuan luwu yang menganggap bahwa bangsawan itu To Manurung (dipercaya), To Warani (Pemberani), To Acca' (pintar/pandai),To Sugi' (Kaya), semakin tidak terlihat dimata masyarakat khususnya masyarakat di kedatuan luwu.Fenomena diatas memberikan gambaran untuk mengetahui perkembangan dan perubahan yang terjadi pada bangsawan *Andi* yang ada di Kota Palopo yakni sebagai pusat Kedatuan Luwu , mengapa bangsawan *Andi* mengalami penurunan kepopuleran dalam kontestasi politik terkhusus pada Pilkada. Dari beberapa Uraian dan penjelasan di atas maka penulis tertarik

untuk merencanakan penelitian dengan Judul **“Politik Kaum Bangsawan Di Kedatuan Luwu : (Studi Atas Melemahnya Popularitas “Andi” Dalam Pemilihan Walikota Di Kota Palopo Tahun 2013-2018)**

## **1.2. Pertanyaan Penelitian**

- 1.2.1. Apa Penyebab Melemahnya Popularitas *Andi* di Kedatuan Luwu Pada Pemilihan Walikota Di Kota Palopo Tahun 2013-2018?
- 1.2.2. Bagaimana Peran *Andi* di Kedatuan Luwu dalam Pemilihan Walikota Di Kota Palopo Tahun 2013-2018

## **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

- 1.3.1.1. Untuk Mengetahui Apa Penyebab Melemahnya Popularitas *Andi* di Kedatuan Luwu Pada Pilwakot di Kota Palopo tahun 2013-2018 ?
- 1.3.2. Untuk Mengetahui Bagaimana Peran *Andi* di Kedatuan Luwu dalam Pemilihan Walikota Di Kota Palopo Tahun 2013-2018

### **Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangsi pemikiran yang positif terhadap pengembangan tentang elit politik lokal khususnya bangsawan “*Andi*” di Kota Palopo. Sehingga tidak hanya bersifat sementara tetapi jangka panjang untuk melihat kondisi politik yang berada di tengah-tengah masyarakat pada khususnya Kedatuan Luwu, juga dapat menjadi bahan pertimbangan dan perbandingan ketika ingin memahami seperti apa peta politik di Sulawesi Selatan saat ini khususnya di Kota Palopo.